DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN EVALUASI RENSTRA DINAS PERAKIM 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2019

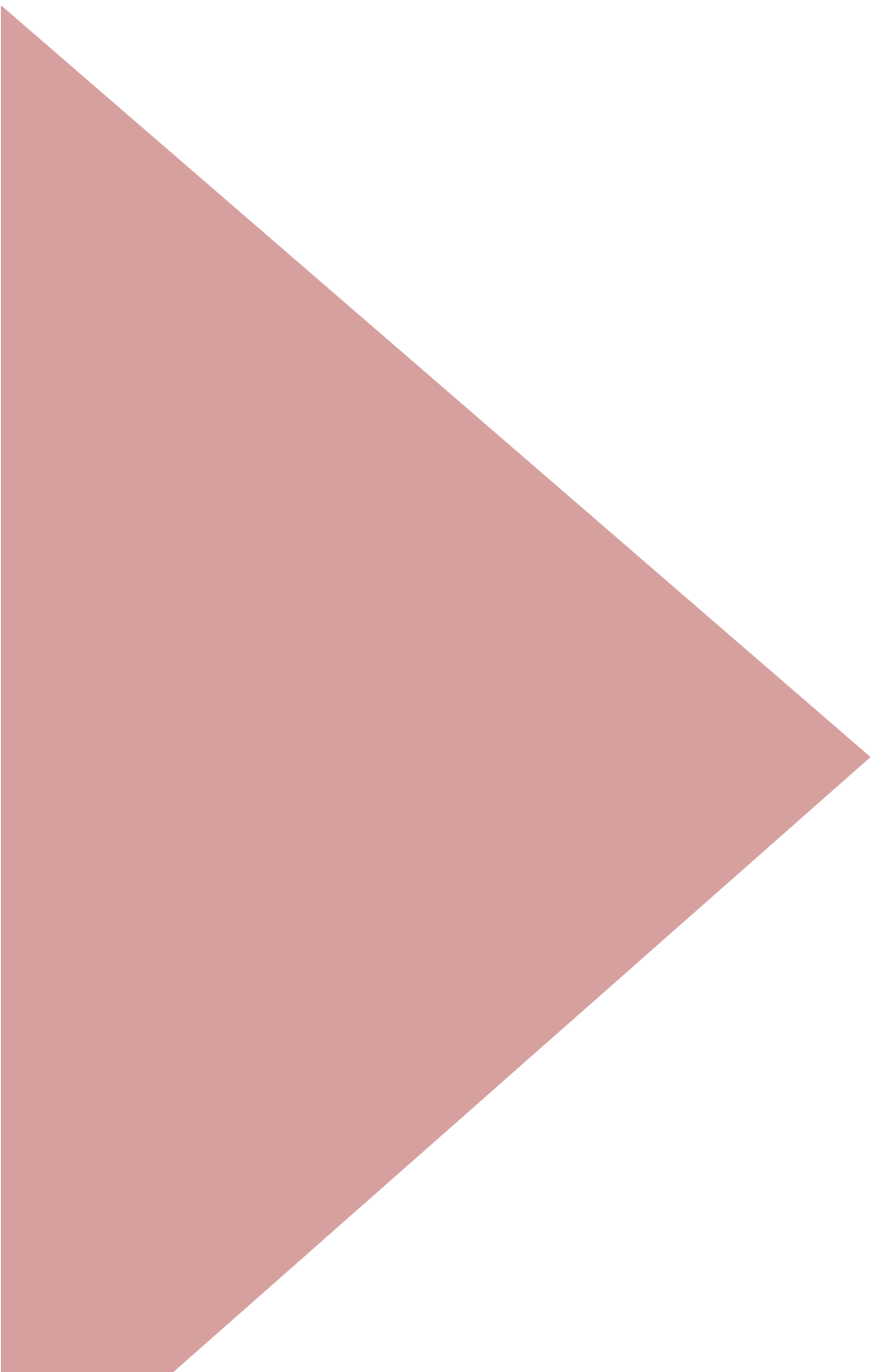

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Evaluasi Renstra Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengetahui hasil program dan kegiatan yang telah berjalan dan terakomodir sehingga dapat mengetahui seberapa besar target dan sasaran yang sudah tertangani. Selain itu juga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat program yang telah tertangani dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Evaluasi Renstra Dinas PERAKIM dikhususkan pada pembahasan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran. Perhitungan capaian indikator kinerja tujuan dan capaian indikator sasaran pada Renstra Dinas PERAKIM Tahun 2018-2019 diuraikan sebagai berikut:
Indikator kinerja tujuan Renstra Dinas PERAKIM Tahun 2019 yaitu:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 83,65% dan target akhir tahun Renstra sebesar 89,28%
   b. Capaian Tahun 2019 sebesar 84,35%
   c. Perhitungan ini didapatkan dari:
      - Capaian RTLH di tahun 2019, baik dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/ kota maupun CSR sebanyak 102.570 unit RTLH.
      - Capaian pemenuhan *backlog* yang dilakukan dari anggaran Pusat maupun dari swasta sebanyak 12.762 unit rumah.
   d. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 100,84% dan persentase capaian terhadap tahun akhir Renstra sebesar 94,48%
2. Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 79,26% dan target akhir tahun Renstra sebesar 79,39%
   b. Capaian Tahun 2019 sebesar 79,33%
   c. Perhitungan ini didapatkan dari luasan kawasan kumuh yang ditangani baik dari anggaran APBN, anggaran APBD Provinsi (total luas kawasan kumuh yang tertangani di tahun 2019 adalah sebesar 776,56 Ha)
3. Persentase kepastian hukum atas bidang tanah, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 100% dan target akhir tahun Renstra sebesar 100%
   b. Capaian Tahun 2019 sebesar 108,91%

c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 108,91%

4. Nilai kepuasan masyarakat, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 100% dan target akhir tahun Renstra sebesar 100%
   b. Capaian Tahun 2019 sebesar 79,75%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 79,75%

Indikator kinerja sasaran Renstra Dinas Perakim Tahun 2019 yaitu:

1. Persentase peningkatan jumlah RLH, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 2,90% dan target terhadap tahun akhir Renstra sebesar 34,16%
   b. Capaian Tahun 2019 sebesar 6,48%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 223,45% dan persentase capaian terhadap tahun akhir Renstra sebesar 18,97%
2. Persentase penurunan kawasan kumuh, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target Tahun 2019 sebesar 77,12% dan target terhadap tahun akhir Renstra sebesar 49,83%
   b. Capaian tahun 2019 sebesar 60,35%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 127,79% dan persentase capaian terhadap tahun akhir Renstra sebesar 82,57%
3. Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target tahun 2019 sebesar 100% dan target tahun akhir Renstra sebesar 100%
   b. Capaian tahun 2019 sebesar 108,91%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 108,91%
4. Nilai kepuasan masyarakat, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target tahun 2019 sebesar 100% dan target tahun akhir Renstra sebesar 100%
   b. Capaian tahun 2019 sebesar 79,75%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 79,75%
5. Nilai SAKIP perangkat daerah, capaian sebagaimana dibawah ini:
   a. Target tahun 2019 sebesar 71,65% dan target tahun akhir Renstra sebesar 72,25%
   b. Capaian tahun 2019 sebesar 73,10%
   c. Persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 102,02% dan persentase capaian terhadap tahun akhir Renstra sebesar 101,18%

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan terkait evaluasi yang telah dilakukan terhadap Renstra Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 antara lain: dibutuhkan inventarisasi dan *update* data secara berkesinambungan dan penguatan koordinasi yang baik dari tingkat pusat maupun ditingkat kabupaten/ kota. Minimnya inovasi dalam pengembangan konsep, desain dan metode dalam penyediaan rumah layak huni sehingga perlu penerapan implementasi hasil rekayasa teknologi pada bidang perumahan. Perlu adanya pengendalian terhadap munculnya kawasan kumuh baru. Diperlukan peninjauan terhadap dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 yang dikaitkan dengan perkembangan peraturan dan revisi pada indikator kinerja. Indikator Kinerja yang terdapat pada Renstra, perlu dikaitkan dengan peraturan dan capaian yang ada, seperti: UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permen PUPR No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Permendagri 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM yang dari keempat peraturan tersebut disebutkan bahwa urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, Renstra juga perlu dikaitkan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan *update* data dan capaian pada Renstra Dinas PERAKIM tahun 2018-2023.

Semarang, Maret 2020

Kepala Bidang Keterpaduan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ir. Effendi Nugroho W, MT
NIP. 1962023 198810 1 001

Bab I
Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan hidup dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Pemenuhan perumahan dan permukiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dinas yang berperan dalam melaksanakan program dan kegiatan lingkup perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Dinas tersebut dibentuk melalui Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2016, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Pergub No.61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa, salah satu tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Dinas PERAKIM Prov.jateng) yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu evaluasi RENSTRA Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 yang telah berjalan. Kegiatan Evaluasi Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dilakukan untuk mengetahui capaian sasaran program dan kegiatan pembangunan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari proses kontrol terhadap semua kegiatan yang saat ini sedang berlangsung maupun yang akan datang.

Proses monitoring, evaluasi dan pembinaan diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran program serta kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Salah satu keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dengan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang menjadi jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayan Minimal.

Hasil dari evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 digunakan sebagai bahan pertimbangan, arahan serta masukan dalam penentuan kebijakan dan peraturan yang menjadi rencana dari Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar dalam pembangunan serta implentasi program dan kegiatan selaras sesuai dengan tujuan dan sasaran yang menjadi dasar dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Evaluasi RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 di fokuskan pada pencapaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator program. Hasil evaluasi RENSTRA Dinas sebagaimana tertuang pada bab IV.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu suatu bentuk proses pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan evaluasi untuk memberikan arahan awal dan men*support* program dan kegiatan agar berjalan sesuai perencanaan dan maksimal. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

a. Melaporkan Hasil Evaluasi, permasalahan dan solusi, strategi pencapaian dan capaian dari kegiatan dan program mulai tahun 2018 hingga 2023. Untuk tahun ini adalah untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2019;
b. Menyediakan data Hasil Evaluasi kegiatan di tahun 2019;
c. Memberikan beberapa saran bagi RENSTRA dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program;
d. Melakukan koordinasi dan menyampaikan hasil evaluasi dengan semua bidang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.3. SASARAN

a. Hasil Evaluasi Renstra Dinas Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada capaian program dan kegiatan tahun 2018-2019 sebagai langkah

awal dalam proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Data hasil evaluasi program dan kegiatan di tahun 2019;

c. Saran dan rekomendasi sebagai masukan yang akan digunakan dalam menyusun RENSTRA di masa yang akan datang ;

d. Sinergis antara tim Teknis dan pelaksana program dan kegiatan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pada laporan Evaluasi RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Lokasi.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang terdapat pada laporan Evaluasi RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) substansi yaitu Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program. Tiga substansi tersebut mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Berikut penjelasan dari masing- masing substansi.

A. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan ketersediaan Rumah Layah Huni dan Kawasan Permukiman yang berkualitas.	- Persentase (%) rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak - Persentase (%) kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase (%) kepastian hukum atas bidang tanah
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

B. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

C. Indikator Program

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah gedung yang direhab
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan informasi publik perangkat daerah
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
Pembangunan Perumahan	- Persentase rumah layak huni yang disediakan - Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	Jumlah rumah yang ditangani
Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani
Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus
Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	- Jumlah dokumen yang disusun - Jumlah unit rumah yang dibangun
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani

PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani
Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani
Pemantauan kawasan permukiman kumuh	Jumlah laporan pemantauan kawasan kumuh
Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman
Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman
Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum
Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan
Penanganan Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani
Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan

PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR
Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 5° 4' dan 8° 3' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur. Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 922 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah.

Bab II
Landasan Hukum

2.1 LANDASAN PENGERTIAN EVALUASI

Konsesi bahwa evaluasi merupakan proses identifikasi dan menilai untuk mengukur suatu kegiatan atau pekerjan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai, atau bisa disebut juga sebagai kegiatan mengumpulkan data ataupun informasi mengenai kinerja suatu metode atau prinsip kerja atau mekanisme peralatan yang hasil dari kegiatan tersebut yang nantinya digunakan sebagai penentuan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.

2.2 DEFINISI EVALUASI

Secara formatif konsesi bahwa definisi evaluasi merupakan proses identifikasi dan menilai untuk mengukur suatu kegiatan atau pekerjan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Berdasarakan *William N.Dunn* (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik *(public policy)* adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar, meskipun demikian kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar. Analisis kebijakan publik *(public policy analysis)* merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik *(public policy process).*

Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan public. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat, kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya.

Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan yang bersifat penandaan *(designative)* dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan *normative*. Prosedur analisis berdasarkan letak waktu dalam hubungannya dengan tindakan dibagi dua yaitu *ex ante dan ex post*. Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang *(ex ante)*. Sedangkan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu *(ex post).*

Analisis *ex post* berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli ilmu sosial dan politik. Sedangkan analisis *ex ante* berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, sistem analisis dan *operations research.* Analisis kebijakan biasanya terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi dan kesimpulan. Pertimbangan kebijakan seringkali lebih bersifat politis dibandingkan bersifat obyektif sehingga bisa saja analis tidak bisa melakukan apa yang diminta klien.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, diantaranya dia bisa memprotes dengan menyatakan apa yang diminta klien tersebut tidak etis. Apabila protesnya bisa menyadarkan klien atau karena sesuatu hal analis jadi menuruti klien maka persoalannya selesai. Tetapi apabila tidak, analis bisa saja meminta berhenti dari pekerjaannya atau dia tetap bekerja pada klien tetapi tidak loyal (selingkuh) dengan membocorkan kelemahan-kelemahan kebijakan tersebut dan kelemahan klien ke pihak lain.

2.3 KEBIJAKAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

A. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kemudahan dalam penanganan permasalahan perumahan dan kawasan

permukiman, dengan lebih menekankan agar proses pelaksanaan penanganan maupun proses pembangunan dapat berjalan dengan cepat serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun kegiatan.

Proses pembagian urusan bidang perumahan Daerah Provinsi lebih kepada penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dalam skala provinsi, melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan wewenang dalam pembagian urusan kawasan permukiman dengan melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan cakupan luasan 10 (sepuluh) hektar sampai dengan dibawah 15 (lima belas) hektar. Selain itu juga memiliki wewenang dalam proses sertifikasi dan registrasi bagi orang maupun badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU dengan setingkat kemampuan menengah.

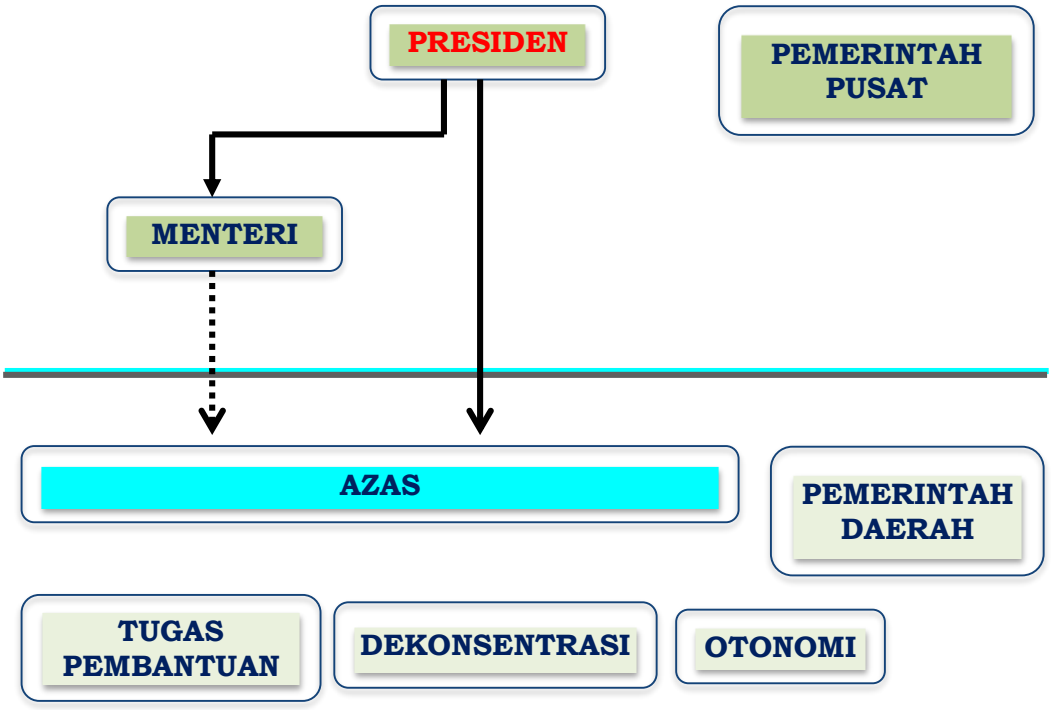

Sumber: Paparan UU. No 23 Tahun 2014 Dr. HALILUL KHAIRI, M.Si

DIAGRAM URUSAN PEMERINTAHAN

Peran dalam pembagian urusan daerah provinsi menjadi dasar dan fokus dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

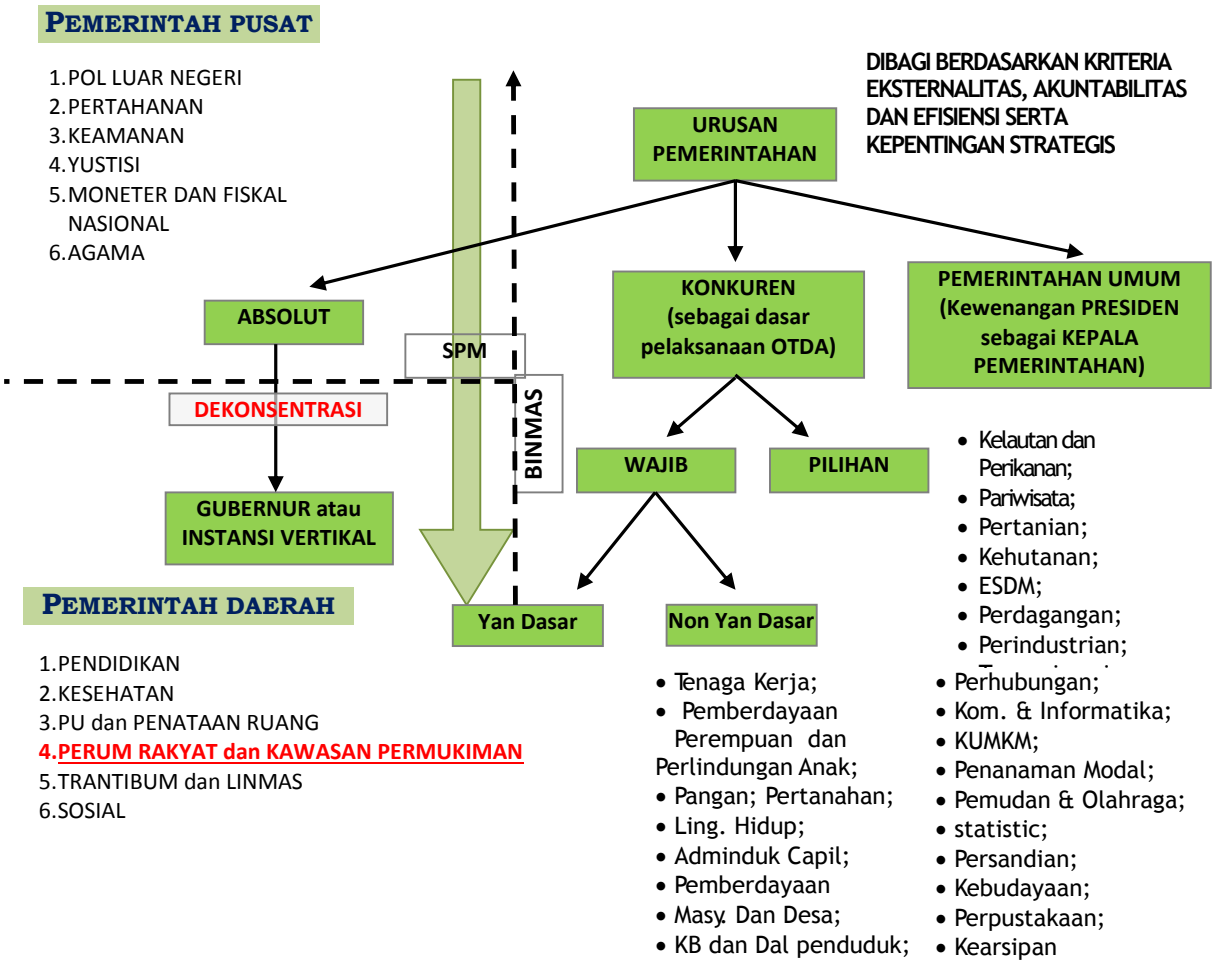

Sumber: slide PEMDA revisi Alma'Arif

DIAGRAM URUSAN PEMERINTAHAN TERBAGI BERDASAR KRITERIA EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFISIENSI SERTA KEP. STRATEGIS

Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Konkuren.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang disebutkan pada pasal 11 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seperti sudah disinggung, pengertian perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Jenis rumah jika dilihat dari pelaku pembangunan dan penghunian yang terdiri dari 5 jenis, yaitu Rumah Komersial, Rumah Umum, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Negara.

C. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Tehadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kondisi saat ini penanganan yang menjadi pekerjaan terbesar selain menyediakan perumahan dan prasarana dan sarana umum, adalah dengan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, kegiatan saat ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng,

Dinas memiliki peran dalam penanganan yang saat ini terkosentrasi dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, startegi beserta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.

Sedangkan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan yang terlingkup dalam penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendaaan dan sistem pembiyaan serta memberikan stimulan peran masyarakat yang terkoordinir dan terpadu.

Kebutuhan data dasar atau *baseline* yang berdasarkan perolehan sumber data harus sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan melakukan identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sesuai peraturan dan kaidah penilaian diserahkan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

D. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d. Kesesuaian anatara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah Provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat daerah dan RPJMD Provinsi.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indicator kinerja perangkat daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi telah dilaksanakan melalui Renja perangkat daerah provinsi.

E. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sistem klasifikasi dan kodefikasi pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kode 1.04 sebagai bentuk kemudahan dalam memberikan sistem pengkodean dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Pengkodean tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan secara rinci dalam

proses pelaksanaan pembangunan maupun penanganan perumahan dan kawasan permukiman.

Sistem klarifikasi dan pengkodean memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi karena beberapa kegiatan sudah memiliki runtutan serta penyusunan secara sistematis sehingga lebih memaksimalkan dalam pembagian urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu sistem pengkodean lebih memperjelas peran fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan serta bentuk pengkodean dalam rekening, sehingga menjadi acuan baku yang digunakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

F. Penyandingan UU No 23 Tahun 2014 dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Penjelasan Penjabaran Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Memberikan penjabaran dalam urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Penyandingan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019

UU NOMOR 23 TAHUN 2014	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
SUB URUSAN PERUMAHAN a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi ▪ Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan ▪ Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani ▪ Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana ▪ Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi ▪ Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

UU NOMOR 23 TAHUN 2014	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana ▪ Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan ▪ Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP ▪ Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator ▪ Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana ▪ Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana ▪ Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ▪ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ▪ Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ▪ Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi ▪ Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH - Tidak Ada Kewenangan Provinsi
SUB URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - Tidak ada Kewenangan Provinsi	
SUB URUSAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

UU NOMOR 23 TAHUN 2014	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
a. Penyelenggaraan PSU permukiman.	▪ Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman ▪ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
SUB URUSAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
SUB URUSAN IZIN LOKASI a. Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI a. Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi
SUB URUSAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM a. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM a. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi ▪ Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
SUB URUSAN SENGKETA TANAH GARAPAN a. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
SUB URUSAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN a. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

UU NOMOR 23 TAHUN 2014	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ▪ Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
SUB URUSAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH *ABSENTEE* a. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE a. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah ▪ Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota b. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota ▪ Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB URUSAN TANAH ULAYAT a. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT a. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
SUB URUSAN TANAH KOSONG a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi b. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong ▪ Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong ▪ Pemanfaatan Tanah Kosong
SUB URUSAN IZIN MEMBUKA TANAH - Tidak ada Kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH - Tidak ada Kewenangan Provinsi

UU NOMOR 23 TAHUN 2014	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
SUB URUSAN PENGGUNAAN TANAH a. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH a. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi**

Sumber: Bidang Keterpaduan 2019

Sebagai penyandingan antara Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memberikan gambaran perubahan dalam penjabaran urusan yang dapat mempermudah pemahaman dalam urutan serta pembagian urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta urutan serta uraian dari masing-masing urusan yang sudah di jabarkan sesuai dengan fungsi dan kepentingan.

G. Permen PUPR No.29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan Pemerintahan Wajib yang melaksanakan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: jenis pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; dan penerima layanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Bab III

Renstra Dinas Perakim 2018-2023

3.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berikut adalah tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	- Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan - Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan - Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan	- Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni - Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan - Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	- PenguranganKawasan Kumuh - Pengembangan PSU - Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	- Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi - Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
		- Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan,	- Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan - Pembinaan dan evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kawasan permukiman dan pertanahan	perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan - Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Peningkatan tertib administrasi pertanahan - Penanganan permasalahan pertanahan - Peningkatan kapasitas masyarakat	- Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah - Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat - Fasilitasi penangangan permasalahan pertanahan - Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah	- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran - Peningkatan pelayanan kepegawaian	- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan	- LAKIP - Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

Bab III - 2

Cascading Renstra Dinas Perakim Tahun 2018-2023

CATATAN:
Penyusunan RKPD TH. 2019 dilaksanakan terlebih dahulu (N-1) daripda penyusunan RPJMD/RENSTRA TH. 2018-2023, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur program/ kegiatan → selama proses penyusunan RPJMD/ RENSTRA terjadi dinamika

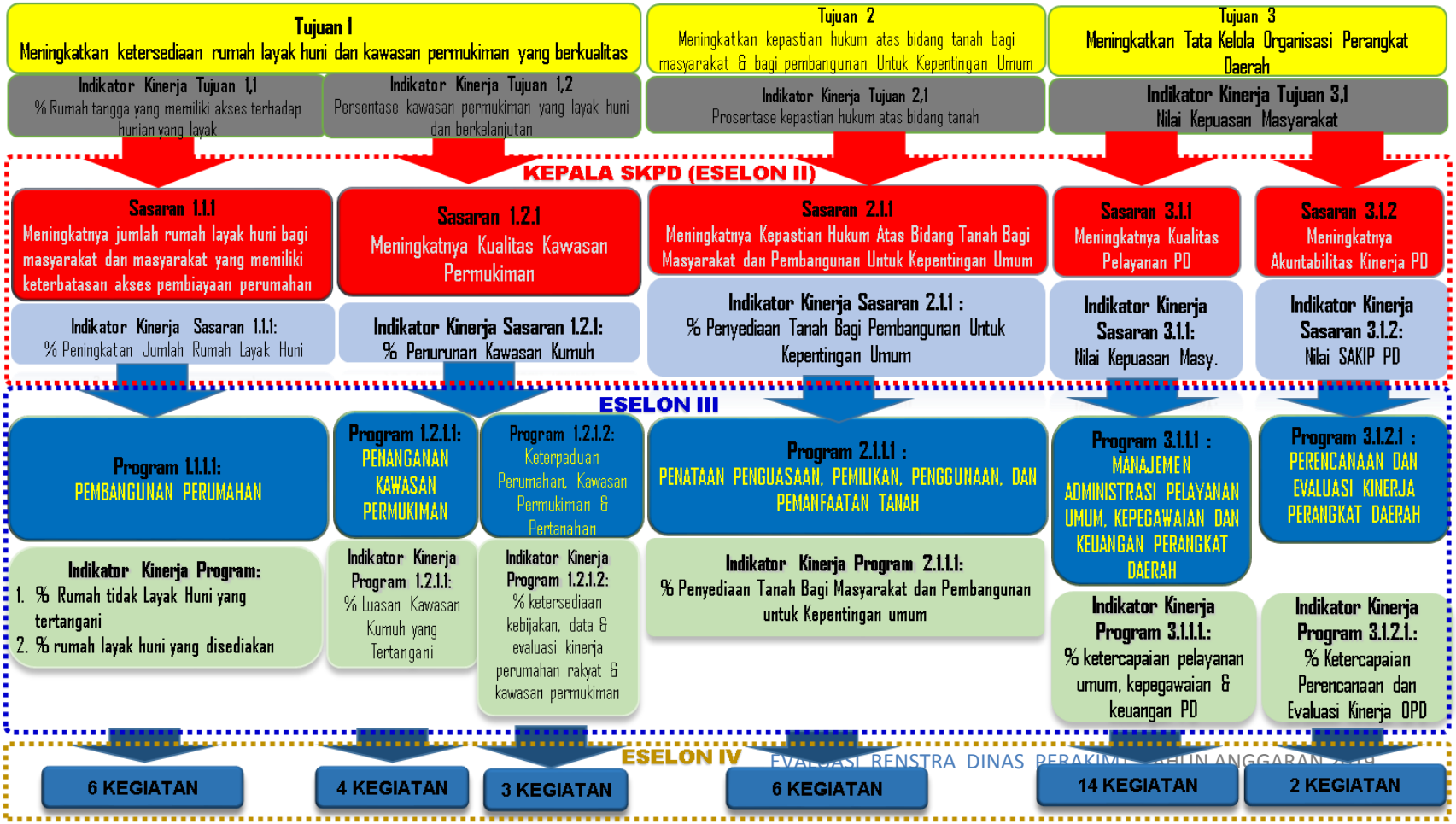

3.2 INDIKATOR KINERJA TUJUAN DISPERAKIM PROV. JATENG TAHUN 2018-2023

Berikut ditampilkan tabel indikator kinerja tujuan beserta penjelasan dari masing-masing indikator.

Tabel 3. 2
Indikator Kinerja Tujuan Disperakim Prov. Jateng Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	80,31	83,10	83,65	84,24	85,91	87,60	89,28	89,28
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	0	0	79,26	79,29	79,32	79,36	79,39	79,39
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

❖ **Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Tehadap Hunian yang Layak**

Tabel 3. 3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak

URAIAN	2018	KOMULATIF	2019	KOMULATIF	2020	KOMULATIF	2021	KOMULATIF	2022	KOMULATIF	2023	KOMULATIF
CAPAIAN RTLH PROVINSI	***44,877***	***44,877***	5,000	***49,877***	5,000	***54,877***	5,000	***59,877***	5,000	***64,877***	5,000	***69,877***
CAPAIAN RTLH KAB/KOTA	***3,386***	***3,386***	23,427	***26,813***	25,677	***52,490***	25,677	***78,167***	25,677	***103,844***	25,677	***129,521***
CAPAIAN RTLH APBN	***6,979***	***6,979***	17,500	***24,479***	17,500	***41,979***	17,500	***59,479***	17,500	***76,979***	17,500	***94,479***
CAPAIAN RTLH CSR DAN LAIN-LAIN	***45,457***	***45,457***		***45,457***		***45,457***		***45,457***		***45,457***		***45,457***
TOTAL CAPAIAN RTLH (APBN, PROV, KAB/KOTA)	**100,699**	**100,699**	**45,927**	**146,626**	**48,177**	**194,803**	**48,177**	**242,980**	**48,177**	**291,157**	**48,177**	**339,334**
CAPAIAN BACKLOG	**23,874**	**23,874**	5,224	**29,098**	5,724	**34,822**	6,032	**40,854**	6,340	**47,194**	6,532	**53,726**
JUMLAH RUMAH (By Supas 2015)	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***	***8,713,671***
JUMLAH BACKLOG SUPAS 2015	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***	***503,708***
JUMLAH RTLH PBDT SUPAS 2015	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***	***1,682,723***
JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI SUPAS 2015	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***	***7,534,656***
Rasio Rumah Layak Huni Hingga 2018	**83.10%**	**83.10%**	**82.30%**	**83.65%**	**82.33%**	**84.24%**	**82.33%**	**84.82%**	**82.34%**	**85.41%**	**82.34%**	**86.01%**

*Data PBDT Simperum Jateng Prov

❖ **Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan**

Tabel 3. 4
Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LUAS KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	per tahun	3,982.88	207.97	220.83	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	275.46	249.99
	komulatif		207.97	428.79	685.09	941.38	1,197.67	1,453.97	1,710.26	1,966.55	2,222.85	2,479.14	2,754.60	3,004.59
LUAS KAWASAN KUMUH	3,004.59													
LUAS KAWASAN PERMUKIMAN	716,213.00													
LUAS KAWASAN BENCANA DI KAWASAN PERMUKIMAN	145,781.11													

❖ **Indikator Kinerja Tujuan Pertanahan**

Tabel 3. 5
Indikator kinerja Tujuan Pertanahan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

3.3 INDIKATOR KINERJA SASARAN DISPERAKIM PROV. JATENG TAHUN 2018-2023

Berikut ditampilkan tabel indikator kinerja sasaran beserta penjelasan dari masing-masing indikator.

Tabel 3. 6
Indikator Kinerja Sasaran Disperakim Prov. Jateng Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	0	0	2,90	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	0	0	77,12	71,03	63,97	56,90	49,83	49,83
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	71,31	71,50	71,65	71,80	71,95	72,10	72,25	72,25

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

❖ **Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni**

Tabel 3. 7
Persentase Peningkatan Jumlh Rumah Layak Huni

*Baseline 2018		TARGET	tahun ke-1 th. 2019	komulatif	tahun ke-2 th. 2020	komulatif	tahun ke-3 th. 2021	komulatif	tahun ke-4 th. 2022	komulatif	tahun ke-5 th. 2023	komulatif
6,979	**pusat**	**316,405**	5,000	5,000	5,000	10,000	30,640	40,640	30,640	71,281	30,640	101,921
44,877	**prov**	**474,607**	23,427	23,427	25,677	49,104	42,550	91,654	42,550	134,205	42,550	176,755
3,386	**kab/kota**	**791,012**	17,500	17,500	17,500	35,000	75,601	110,601	75,601	186,202	75,601	261,804
45,457	**csr dll**	**-**		-		-		-		-		-
100,699	**jumlah**	**1,582,024**	45,927	45,927	48,177	94,104	148,792	242,896	148,792	391,688	148,792	540,480
5.98%	**% agregat**		2.90%	2.90%	3.05%	5.95%	9.41%	15.35%	9.41%	24.76%	9.41%	34.16%
	% provinsi		4.94%	4.94%	5.41%	10.35%	8.97%	19.31%	8.97%	28.28%	8.97%	37.24%

*Berdasarkan Data PBDT 2015 di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 Unit rumah.

❖ **Persentase Penurunan Kawasan Kumuh**

Tabel 3. 8
Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

Baseline 2017	Baseline 2018		tahun 1	ha	tahun 2	ha	tahun 3	ha	tahun 4	ha	tahun 5	ha
			th. 2019	penanganan	th. 2020	penanganan	th. 2021	penanganan	th. 2022	penanganan	th. 2023	penanganan
6,987.47	3,004.59	pusat	1,743	158.41	1,584	316.82	1,426	475.23	1,267	633.64	1,109	792.05
	82.86	prov	464.66	10.00	454.66	20.00	409.19	65.47	363.73	110.93	318.26	156.40
		kab/kota	589	39.55	537	91.97	485	144.39	432	196.81	380	249.23
		jumlah	2,797	207.97	2,576	428.79	2,320	685.09	2,063	941.38	1,807	1,197.67
		agregat	77.125%		7103.51%		6396.71%		5689.90%		4983.10%	
		provinsi	97.89%	2.11%	95.79%	4.21%	86.21%	13.79%	76.63%	23.37%	67.05%	32.95%

❖ **Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Tabel 3. 9
Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

❖ **Nilai Kepuasan Masyarakat**

Tabel 3. 10
Nilai Kepuasan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

❖ **Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)**

Tabel 3. 11
Nilai Sakip Perangkat Daerah (PD)

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	71,31	71,50	71,65	71,80	71,95	72,10	72,25	72,25

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

3.4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DISPERAKIM PROV. JATENG

Tabel 3. 12
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Disperakim Prov. Jateng Tahun 2018-2023

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)	Dokumen	1	1	1	4	4	4	4	17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah.	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	Paket	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah gedung yang direhab	Unit	0	0	0	1	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Paket	1	0	1	2	2	2	2	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	0	0	5	5	5	5	5	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan informasi publik perangkat daerah	Dokumen	12	13	14	14	14	14	14	70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0	0	0	4.57	7.7	10.39	11.76	11.76	Bidang Perumahan
	Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0.3	2.35	4.94	10.35	19.31	28.28	37.24	37.24	Bidang Perumahan
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	0	0	23427	0	0	0	0	23427	Bidang Perumahan
Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Unit	0	0	150	0	0	0	0	150	Bidang Perumahan

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	0	0	2	0	0	0	0	0	Bidang Perumahan
Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Bidang Perumahan
	Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	0	0	0	500	750	1000	1000	3250	Bidang Perumahan
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	0	0	0	0	0	Bidang Perumahan
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	219585	23427	0	25677	42550	42550	42550	153327	Bidang Perumahan
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	0	0	0	217	233	291	233	974	Bidang Perumahan
Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	16.62	17.14	2.11	4.21	13.79	23.37	32.95	32.95	Bidang Kawasan Pemukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani	Lokasi	6	6	6	2	7	7	8	22	Bidang Kawasan Pemukiman
Pemantauan kawasan permukiman kumuh	Jumlah laporan pemantauan kawasan kumuh	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	1	Bidang Kawasan Pemukiman

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Lokasi	1	1	0	6	6	6	6	24	Bidang Kawasan Pemukiman
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	1	Bidang Kawasan Pemukiman
Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	0	3	2	2	1	8	Bidang Kawasan Pemukiman
Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	3	4	5	4	5	4	22	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	4	3	5	5	5	5	23	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	15	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pembangunan untuk kepentingan umum										
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Penanganan Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	100	100	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	0	20	0	0	0	0	20	Bidang Pertanahan
Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	20	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	100	100	0	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan

Sumber: RENSTRA Dinas PKP Prov.Jateng Tahun 2018-2023

B. PERHITUNGAN CAPAIAN RENSTRA DISPERAKIM TAHUN 2018-2023

❖ BIDANG PERUMAHAN

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.04.15	Pembangunan Perumahan												
		Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0	4.57	7.7	10.39	12.5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	4.94	10.35	19.31	28.28	37.24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	23,427	0	0	0	0					
	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Unit	150	0	0	0	0					
	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	2	0	0	0	0					
	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2					
		Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	0	500	750	1,000	1,250					

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
	Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	0	0	0	0						
	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	0	25,677	42,550	42,550	42,550						
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	0	217	233	291	233			-	-	-	-
		* Rusun	Unit	0	0	58	116	58						
		* Relokasi Bencana	Unit	0	52	25	25	25						
		* Rehap Pasca Bencana	Unit	0	165	150	150	150						

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Persentase Rumah Layak Huni yang Disediakan

	tahun ke-1	komulatif	tahun ke-2	komulatif	tahun ke-3	komulatif	tahun ke-4	komulatif		tahun ke-5	komulatif
	th. 2019		th. 2020		th. 2021		th. 2022			th. 2023	
pusat	224	224	224	448	224	672	224	896		224	1,120
prov	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
pengembang	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	15,000	5,000	20,000		5,000	25,000
jumlah	5,224	5,224	5,224	10,448	5,224	15,672	5,224	20,896		5,224	26,120
% Prov thd total	-	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

	2019	2020	2021	2022	2023
RTLH	-	-	-	-	-
KOMULATIF	-	-	-	-	-
%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

❖ BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.04.16	Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	2.11	4.21	13.79	23.37	32.95	2.11%	4.21%	13.79%	23.37%	32.95%
1.04.16.001	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani	Lokasi	6	2	7	7	8					
1.04.16.002	Pemantauan kawasan permukiman kumuh	Jumlah laporan pemantauan kawasan kumuh	Dokumen	1	0	0	0	0					
1.04.16.003	Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Lokasi	1 Dokumen	6	6	6	6					
1.04.16.004	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	1	0	0	0	0					
1.04.16.005	Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	3	2	2	1					

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Penanganan Kawasan Permukiman

	2019	2020	2021	2022	2023
ha penanganan	10	20	65.466	110.932	156.398

	2019	2020	2021	2022	2023
% penanganan	2.11%	4.21%	13.79%	23.37%	32.95%
target penanganan prov	474.66	ha			

❖ BIDANG KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1.04.17	Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.04.17.001	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan	Dokumen	4	5	4	5	4						
1.04.17.002	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	5	5	5	5						
1.04.17.003	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	3	3	3	3	3						
			TOTAL	10	13	12	13	12						

❖ BIDANG PERTANAHAN

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1.04.15	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah													
		Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100	100		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.04.15.013	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	20	0	0	0	0						
2.04.15.014	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan	%	20	0	0	0	0						
2.04.15.015	Penanganan Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	20	20	20	20	20						
2.04.15.016	Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	20	0	0	0	0						
2.04.15.017	Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	20	0	0	0	0						
2.04.15.018	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	20	20	20	20	20						
2.04.15.019	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	0	20	20	20	20						

Kata Pengantar

Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mengetahui hasil program dan kegiatan yang telah berjalan dan terakomodir sehingga dapat mengetahui seberapa besar target dan sasaran yang sudah tertangani, serta mengetahui seberapa besar manfaat dan tertangani program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah .

Adapun Tujuan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan perencanaan kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanhan dengan lebih mengerucutkan ke bidang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kawasan Kumuh dan Sertifikasi Tanah dengan penanganan sesuai dengan program dan rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Evaluasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan muatan substansi meliputi latar belakang, landasan hukum, permasalahan, strategi dan capaian.

Terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Evaluasi Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, semoga dengan tersusunnya dokumen ini nantinya dapat memberikan manfaa..

Bab III - 26

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud Tujuan 2
1.3 Sasaran 3

BAB 2 LANDASAN HUKUM

2.1 Landasan Pengertian Evaluasi 4
2.2 Definisi Evaluasi 4
2.3 Kebijakan Nasional..... 5

BAB 3 Permasalahan, Strategi dan Capaian

3.1 Permasalahan dan Solusi 18
3.2 Strategi Pencapaian 20
3.3 Capaian 21

BAB 4 PENDEKATAN & METODOLOGI PELAKSANAAN STUDI

4.1 Penutup..... 23
4.2 Saran 23

Bab IV
Capaian Renstra

CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan dan indikator kinerja tujuan pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan pada RENSTRA Dinas
(Target dan Capaian Tahun 2019)

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	2019		2020
		Target	Capaian	Target
1. Meningkatkan ketersediaan RLH dan kawasan permukiman yang berkualitas	% rumah tangga yang memiliki akses terhadp hunian yang layak	83,65%	84,35%	84,24%
	% kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	79,26%	79,33%	79,29%
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	% kepastian hukum atas bidang tanah	100%	108,91%	100%
3. Maningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	79,75%	100%

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

TUJUAN 1: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas

Memiliki 2 (dua) indikator kinerja, dengan dukungan capaian sebagai berikut:

- Capaian pada % rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
  Yang mendukung capaian tersebut adalah:
  - Capaian RTLH APBN, yang bersumber dari anggaran:
    - Satker Strategis Penyediaan Perumahan
    - SNVT PnP Jateng
    - RS-RUTILAHU dari Kemensos RI
    - DAK
  - Capaian RTLH provinsi
  - Capaian RTLH kabupaten/ kota, yang bersumber dari anggaran:
    - APBD kabupaten/ kota

- Dana desa

- Capaian, CSR berasal dari:
  - CSR umum
  - CSR perusahaan BUMD
  - CSR perusahaan non BUMD
  - CSR perusahaan BUMN
- Capaian backlog, angka capaian didapatkan dari pembangunan perumahan baru baik landed house ataupun rumah susun dan rumah khusus. Capaian ini dipenuhi dari sumber anggaran:
  - Satker Strategis Penyediaan Perumahan (Pembangunan RUSUN dan RUSUS)
  - SNVT PnP Jateng
  - APBD Provinsi
  - Asosiasi perumahan (REI, Apersi, Apernas, Himperra, Perum Perumnas Reg. V)

Angka total yang didapatkan untuk memenuhi capaian tersebut sebagai berikut:

TABEL 4.2

Jumlah Capaian % Rumah Tangga
yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak

SUMBER	JUMLAH CAPAIAN (unit)
RTLH APBN	
Satker Strategis PP	8.351**
SNVT PnP Jateng	22.782***
RS-RUTILAHU dari Kemensos RI	110**
DAK Reguler	5.482
RTLH provinsi Peningkatan kualitas (RTLH) + PB bencana sebanyak 150 unit	23.208
RTLH kabupaten/ kota	
APBD kabupaten/ kota	26.651
Dana desa	13.598**
RTLH CSR dan lain-lain	
CSR umum	2.388
CSR perusahaan BUMD	*
CSR perusahaan non BUMD	*
CSR perusahaan BUMN	*
Capaian BACKLOG (unit rumah/ kamar)	
Satker Strategis PP (RUSUN)	*
Satker Strategis PP (RUSUS)	*
Satker Strategis PP (Pembangunan Baru)	1.073
SNVT PnP Jateng	206
APBD Provinsi	0
Asosiasi Perumahan	
- REI	6.631
- APERNAS	4.852
- HIMPERA	*

SUMBER	JUMLAH CAPAIAN (unit)
- PERUM PERUMNAS	*
JUMLAH TOTAL	**115.332**
JUMLAH YANG DIAKOMODIR	**92.479**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

CATATAN:

* data belum bisa diakses

** capaian tidak masuk dalam perhitungan CAPAIAN

*** capaian dari SNVT PnP Jateng semula adalah 22.787 unit menjadi 22.782. Hal ini karena terdapat 5 calon penerima yang mengundurkan diri (3 CP dari Kab.Blora & 2 CP dari Kota Tegal)

Breakdown masing-masing kab. / kota pada TABEL 4.6, TABEL 4.7 & TABEL 4.8

Rumus perhitungan capaian hingga tahun 2019, sebagaimana tabel dibawah ini

TABEL 4.3

Perhitungan Indikator Kinerja % Rumah Tangga
yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak

URAIAN	2018	KOMULATIF	2019	KOMULATIF
Capaian RTLH APBN	6.979	6.979	36.725	43.704
Capaian RTLH Provinsi	44.877	44.877	23.208	68.085
Capaian RTLH kab/kota	3.386	3.386	40.249	43.635
Capaian RTLH CSR dan lain-lain	45.457	45.457	2.388	47.845
TOTAL CAPAIAN RTLH	100.699	100.699	**102.570**	203.269
CAPAIAN BACKLOG	23.874	23.874	**12.762**	36.636
Jumlah rumah (by supas 2015)	8.713.671	8.713.671	8.713.671	8.713.671
Jumlah backlog supas 2015	503.708	503.708	503.708	503.708
Jumlah RTLH PBDT supas 2015	1.682.723	1.682.723	1.682.723	1.682.723
Jumlah RLH supas 2015	7.534.656	7.534.656	7.534.656	7.534.656
% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	**83,10%**	**83,10%**	**83,00%**	**84,35%**

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

- Capaian pada % kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
  Yang mendukung capaian tersebut adalah:
  - Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBN
  - Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD Provinsi
  - Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD kabupaten/ kota

Angka total yang didapatkan untuk memenuhi capaian tersebut sebagai berikut:

TABEL 4.4
Jumlah Capaian % Kawasan Permukiman
yang Layak Huni dan Berkelanjutan

SUMBER	LUASAN YANG DITANGANI (Ha)
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBN (KOTAKU)	756,04
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD Provinsi	20,52
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD kabupaten/ kota	0
JUMLAH TOTAL LUASAN KAW. KUMUH YANG DITANGANI	**776,56**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

Breakdown masing-masing kabupaten/ kota pada TABEL 4.9

Rumus perhitungan capaian hingga tahun 2019, sebagaimana tabel dibawah ini

TABEL 4.5
Perhitungan Indikator Kinerja % Kawasan Permukiman
yang Layak Huni dan Berkelanjutan

URAIAN		2018	2019
Luas kawasan kumuh yang ditangani	per tahun	3.982,88	776,56
	komulatif		**776,56**
Luas kawasan kumuh	3.004,59		
Luas kawasan permukiman	716.213,00		
Luas kawasan bencana di kawasan permukiman	145.781,11		
% Kawasan Permukiman yang LH dan Berkelanjutan		**79,23%**	**79,33%**

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

- Data Capaian per Kabupaten/ Kota

TABEL 4.6

Jumlah Capaian Kegiatan Pengurangan RTLH per Kabupaten/ Kota Tahun 2019

NO	KAB/ KOTA	CAPAIAN PENGURANGAN RTLH									
		APBN				APBD PROVINSI		APBD KAB/ KOTA		TOTAL CSR	TOTAL BANTUAN RTLH
		BSPS @17,5 jt	DAK REG @17,5 jt	RS-RUTILAHU KEMENSOS @ 15 JT	SATKER STRATEGIS	BANKEU PEMDES @ Rp.10jt	PB BENCANA	APBD KAB/ KOTA	DANA DESA		
1	Kota Semarang	400	162	-	-	-	-	1.000		5	1.567
2	Kota Salatiga	-	117	-	-	-	-	319		-	436
3	Kab. Semarang	405	153	5	382	624	-	1.000		140	2.709
4	Kab. Kendal	1.109	180	5	135	767	-	763		-	2.959
5	Kab. Kudus	-	158	-	-	323	-			2	483
6	Kab. Demak	500	140	5	-	729	-	692		120	2.186
7	Kab. Jepara	200	178	-	200	552	-	1.033		2	2.165
8	Kab. Rembang	750	137	5	-	861	-	426	2.870	200	5.249
9	Kab. Pati	100	162	-	600	1.182	-	60		105	2.209
10	Kab. Grobogan	700	96	5	-	819	-	500	689	-	2.809
11	Kab. Blora	597	170	5	-	813	-	9		-	1.594
12	Kota Surakarta	405	169	-	-	-	-	206		67	847
13	Kota Magelang	360	165	-	-	-	-			-	525
14	Kab. Magelang	2.690	170	10	2.710	1.093	-	3.000		1	9.674
15	Kab. Wonosobo	430	178	-	210	705	-	625	1.382	313	3.843
16	Kab. Wonogiri	785	174	-	-	753	-	333		177	2.222
17	Kab. Kebumen	550	162	5	-	1.347	-	678	2.500	107	5.349
18	Kab. Sragen	550	170	-	-	588	-	62		-	1.370
19	Kab. Sukoharjo	300	170	-	-	729	-	400	4	300	1.903
20	Kab. Karanganyar	150	150	10	200	486	-	500	550	1	2.047
21	Kab. Klaten	250	150	5	691	1.173	-	2.500		-	4.769
22	Kab. Temanggung	2.140	150	10	300	232	-	832		100	3.764
23	Kab. Purworejo	900	170	20	600	1.401	-	1.000	66	-	4.157
24	Kab. Boyolali	610	170	-	-	782	-	730	577	3	2.872
25	Kota Pekalongan	-	180	-	-	-	-	784		-	964
26	Kota Tegal	298	179	-	-	1.022	-	285		100	1.884
34	Kab. Purbalingga	550	138	5	-	672	16	5.000	953	39	7.373
32	Kab. Banyumas	795	178	-	-	903	16	750		30	2.672
33	Kab. Banjarnegara	500	170	-	-	798	48	760	2.660	248	5.184
31	Kab. Brebes	550	162	-	-	874	11	100	1.347	58	3.102
25	Kab. Batang	375	175	5	-	630	-	910		2	2.097
26	Kab. Pekalongan	920	170	-	250	762	16	350		100	2.568
29	Kab. Tegal	350	157	5	163	-	16	384		1	1.076
28	Kab. Pemalang	1.428	172	-	1.760	631	27	160		-	4.178
35	Kab. Cilacap	2.135	-	5	150	807	-	500		167	3.764
JUMLAH TOTAL PROV. JATENG		**22.782**	**5.482**	**110**	**8.351**	**23.058**	**150**	**26.651**	**13.598**	**2.388**	**102.570**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

CATATAN:

* data belum bisa diakses ***(CSR dari Bank Jateng per Kab/ Kota)***

** capaian tidak masuk dalam perhitungan CAPAIAN

*** capaian dari SNVT PnP Jateng semula adalah 22.787 unit menjadi 22.782. Hal ini karena terdapat 5 calon penerima yang mengundurkan diri (3 CP dari Kab.Blora & 2 CP dari Kota Tegal)

TABEL 4.7

Jumlah Capaian Kegiatan Pengurangan RTLH
per Kabupaten/ Kota Tahun 2019
Sumber Anggaran CSR

NO	KAB/ KOTA	CSR							TOTAL CSR
		BANK JATENG @Rp 15 juta	BAZNAS @ Rp 10 jt	GEODIPA @Rp 10 jt	CSR BINA MARGA @15 JUTA	BUMD Kab/Kota	Sampoo kong Semarang	CSR Lain-Lain	
1	Kota Semarang		-	-	-	-	5		5
2	Kota Salatiga		-	-	-	-	-		-
3	Kab. Semarang	100	-	-	-	-	-	40	140
4	Kab. Kendal		-	-	-	-	-		-
5	Kab. Kudus		2	-	-	-	-		2
6	Kab. Demak	52	1	-	1	-	-	66	120
7	Kab. Jepara		2	-	-	-	-		2
8	Kab. Rembang	100	-	-	-	-	-	100	200
9	Kab. Pati	105	-	-	-	-	-		105
10	Kab. Grobogan		-	-	-	-	-		-
11	Kab. Blora		-	-	-	-	-		-
12	Kota Surakarta	50	-	-	-	17	-		67
13	Kota Magelang		-	-	-	-	-		-
14	Kab. Magelang		1	-	-	-	-		1
15	Kab. Wonosobo	147	-	-	-	-	-	166	313
16	Kab. Wonogiri	133	-	-	-	-	-	44	177
17	Kab. Kebumen	50	-	-	-	-	-	57	107
18	Kab. Sragen		-	-	-	-	-		-
19	Kab. Sukoharjo	150	-	-	-	-	-	150	300
20	Kab. Karanganyar		1	-	-	-	-		1
21	Kab. Klaten		-	-	-	-	-		-
22	Kab. Temanggung	100	-	-	-	-	-		100
23	Kab. Purworejo		-	-	-	-	-		-
24	Kab. Boyolali		3	-	-	-	-		3
25	Kota Pekalongan		-	-	-	-	-		-
26	Kota Tegal	100	-	-	-	-	-		100
34	Kab. Purbalingga		-	-	-	-	-	39	39
32	Kab. Banyumas		-	-	30	-	-		30
33	Kab. Banjarnegara		10	10	-	-	-	228	248
31	Kab. Brebes		3	-	1	-	-	54	58
25	Kab. Batang		2	-	-	-	-		2
26	Kab. Pekalongan	100	-	-	-	-	-		100
29	Kab. Tegal		1	-	-	-	-		1
28	Kab. Pemalang		-	-	-	-	-		-
35	Kab. Cilacap	165	2	-	-	-	-		167

NO	KAB/ KOTA	CSR							TOTAL CSR
		BANK JATENG @Rp 15 juta	BAZNAS @ Rp 10 jt	GEODIPA @Rp 10 jt	CSR BINA MARGA @15 JUTA	BUMD Kab/Kota	Sampoo kong Semarang	CSR Lain-Lain	
TOTAL CSR PROV. JATENG		1.352	28	10	32	17	5	944	2.388

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

TABEL 4.8

Jumlah Capaian Pembangunan Baru (Pengurangan Backlog)
Tahun 2019

NO	KAB/ KOTA	PEMBANGUNAN BARU (PENGURANGAN BACKLOG)									
		SATKER STRATEGIS PP			SNVT PnP JATENG	APBD PROV.	ASOSIASI PENGEMBANG				TOTAL
		PB	RUSUN	RUSUS			REI	APERNAS	HIMPERA	PERUM PERUMNAS	
1	Kota Semarang	*	*	*	94	-	106	-	*	*	200
2	Kota Salatiga	*	*	*	-	-	49	-	*	*	49
3	Kab. Semarang	*	*	*	-	-	96	55	*	*	151
4	Kab. Kendal	*	*	*	-	-	134	825	*	*	959
5	Kab. Kudus	*	*	*	-	-	32	-	*	*	32
6	Kab. Demak	*	*	*	-	-	49	-	*	*	49
7	Kab. Jepara	*	*	*	-	-	353	-	*	*	353
8	Kab. Rembang	*	*	*	-	-	71	-	*	*	71
9	Kab. Pati	*	*	*	-	-	122	-	*	*	122
10	Kab. Grobogan	*	*	*	-	-	10	-	*	*	10
11	Kab. Blora	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
12	Kota Surakarta	*	*	*	-	-	0	180	*	*	180
13	Kota Magelang	*	*	*	65	-	0	-	*	*	65
14	Kab. Magelang	*	*	*	-	-	88	-	*	*	88
15	Kab. Wonosobo	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
16	Kab. Wonogiri	*	*	*	-	-	704	-	*	*	704
17	Kab. Kebumen	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
18	Kab. Sragen	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
19	Kab. Sukoharjo	*	*	*	-	-	786	92	*	*	878
20	Kab. Karanganyar	*	*	*	-	-	451	80	*	*	531
21	Kab. Klaten	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
22	Kab. Temanggung	*	*	*	-	-	45	-	*	*	45
23	Kab. Purworejo	*	*	*	-	-	0	-	*	*	-
24	Kab. Boyolali	*	*	*	-	-	323	260	*	*	583
25	Kota Pekalongan	*	*	*	-	-	7	-	*	*	7
26	Kota Tegal	*	*	*	47	-	0	-	*	*	47
34	Kab. Purbalingga	*	*	*	-	-	440	355	*	*	795
32	Kab. Banyumas	*	*	*	-	-	1.227	-	*	*	1.227
33	Kab. Banjarnegara	*	*	*	-	-	170	-	*	*	170
31	Kab. Brebes	*	*	*	-	-	166	-	*	*	166

NO	KAB/ KOTA	PEMBANGUNAN BARU (PENGURANGAN BACKLOG)									
		SATKER STRATEGIS PP			SNVT PnP JATENG	APBD PROV.	ASOSIASI PENGEMBANG				TOTAL
		PB	RUSUN	RUSUS			REI	APERNAS	HIMPERA	PERUM PERUMNAS	
25	Kab. Batang	*	*	*	-	-	345	435	*	*	780
26	Kab. Pekalongan	*	*	*	-	-	0	2.570	*	*	2.570
29	Kab. Tegal	*	*	*	-	-	316	-	*	*	316
28	Kab. Pemalang	*	*	*	-	-	243	-	*	*	243
35	Kab. Cilacap	*	*	*	-	-	298	-	*	*	298
JUMLAH TOTAL PROV. JATENG		**1.073**	*	*	**206**	**-**	**6.631**	**4.852**	*	*	**12.762**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

CATATAN:

* data belum bisa diakses

** Jumlah Total PB sudah termasuk PB dari Satker Strategis PP, sebesar 1.073 unit

TABEL 4.9

Jumlah Capaian Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani
Tahun 2019

NO	KAB/ KOTA	CAPAIAN (Ha)	
		APBN	APBD Provinsi
1	Kota Semarang	-	-
2	Kota Salatiga	-	-
3	Kab. Semarang	-	-
4	Kab. Kendal	17,34	-
5	Kab. Kudus	10,55	-
6	Kab. Demak	171,41	1,67
7	Kab. Jepara	-	-
8	Kab. Rembang	40,88	-
9	Kab. Pati	-	3,82
10	Kab. Grobogan	-	-
11	Kab. Blora	-	-
12	Kota Surakarta	-	5,95
13	Kota Magelang	27,94	4,12
14	Kab. Magelang	-	-
15	Kab. Wonosobo	-	-
16	Kab. Wonogiri	-	-
17	Kab. Kebumen	89,93	-
18	Kab. Sragen	-	-
19	Kab. Sukoharjo	81,55	-
20	Kab. Karanganyar	-	-
21	Kab. Klaten	-	-
22	Kab. Temanggung	64,32	-

NO	KAB/ KOTA	CAPAIAN (Ha)	
		APBN	APBD Provinsi
23	Kab. Purworejo	-	-
24	Kab. Boyolali	35,23	-
25	Kota Pekalongan	-	-
26	Kota Tegal	-	-
34	Kab. Purbalingga	-	-
32	Kab. Banyumas	-	2,24
33	Kab. Banjarnegara	-	-
31	Kab. Brebes	-	-
25	Kab. Batang	-	-
26	Kab. Pekalongan	65,20	2,72
29	Kab. Tegal	140,63	-
28	Kab. Pemalang	11,07	-
35	Kab. Cilacap	-	-
JUMLAH TOTAL PROV. JATENG		**756,04**	**20,52**

***Sumber**: Dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum

Indikator kinerja tujuan dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja tujuan: ***% kepastian hukum atas bidang tanah***
Yang mendukung capaian tersebut adalah program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan indikator kinerja adalah % penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Capaian sebesar ***108,91%***

TUJUAN 3: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja tujuan dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Nilai kepuasan masyarakat ➔ Capaian sebesar ***79,75%***

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dan indikator kinerja sasaran pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.10

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran pada RENSTRA Dinas
(Target dan Capaian Tahun 2019)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2019		2020
		Target	Capaian	Target
1. Meningkatnya jumlah RLH bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	% Peningkatan jumlah RLH	2,90%	6,48%	5,95%
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	% Penurunan kawasan kumuh	77,12%	60,35%	71,03%
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	% Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	108,91%	100%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	79,75%	100%
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71,65%	73,10%	71,80%

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

SASARAN 1: Meningkatnya jumlah RLH bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan

indikator kinerja sasaran dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran: % Peningkatan jumlah RLH
Yang mendukung capaian tersebut adalah:

- Capaian RTLH APBN, yang bersumber dari anggaran:
  - Satker Strategis Penyediaan Perumahan
  - SNVT PnP Jateng
  - RS-RUTILAHU dari Kemensos RI
  - DAK
- Capaian RTLH provinsi
- Capaian RTLH kabupaten/ kota, yang bersumber dari anggaran:
  - APBD kabupaten/ kota
  - Dana desa
- Capaian, CSR berasal dari:
  - CSR umum
  - CSR perusahaan BUMD
  - CSR perusahaan non BUMD
  - CSR perusahaan BUMN

Angka total yang didapatkan untuk memenuhi capaian tersebut sebagai berikut:

TABEL 4.11

Angka Capaian % Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni

SUMBER	JUMLAH CAPAIAN (unit)
RTLH APBN	
Satker Strategis PP	8.351**
SNVT PnP Jateng	22.782***
RS-RUTILAHU Kemensos RI	110**
DAK	5.482
RTLH provinsi Peningkatan kualitas (RTLH) + PB bencana sebanyak 150 unit	23.208
RTLH kabupaten/ kota	
APBD kabupaten/ kota	26.651
Dana desa	13.598**
RTLH CSR dan lain-lain	
CSR umum	2.388
CSR perusahaan BUMD	*
CSR perusahaan non BUMD	*
CSR perusahaan BUMN	*
JUMLAH TOTAL	**102.570**
JUMLAH YANG DIAKOMODIR	**79.717**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

CATATAN:

* data belum bisa diakses

** capaian tidak masuk dalam perhitungan CAPAIAN

*** capaian dari SNVT PnP Jateng semula adalah 22.787 unit menjadi 22.782. Hal ini karena terdapat 5 calon penerima yang mengundurkan diri (3 CP dari Kab.Blora & 2 CP dari Kota Tegal)

Breakdown masing-masing kabupaten/ kota pada TABEL 4.6, TABEL 4.7, & TABEL 4.8

Rumus perhitungan capaian hingga tahun 2019, sebagaimana tabel dibawah ini

TABEL 4.12

Perhitungan Indikator Kinerja % Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni

BASELINE RTLH	Baseline 2018		TARGET	Tahun ke-1 (th. 2019)	KOMULATIF
Berdasarkan Data PBDT 2015 di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 Unit rumah.	6.979	pusat	316.405	36.725	36.725
	44.877	prov	474.607	23.208	23.208
	3.386	kab/kota	791.012	40.249	40.249
	45.457	csr dll	-	2.388	2.388
	100.699	jumlah	1.582.024	102.570	102.570
	5,98%	% agregat		6,48%	6,48%
		% provinsi		4,89%	4,89%

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

KETERANGAN:

BASELINE RTLH: Berdasarkan data PBDT 2015 di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 unit rumah

BASELINE RTLH 2018 :
- Pusat : 6.979 unit
- Provinsi : 44.877 unit
- kabupaten/ kota : 3.386 unit
- CSR, dll : 45.457 unit

TOTAL BASELINE 2018 : 100.699 unit

GRAFIK 4.1

Prosentase Anggaran Kegiatan Pengurangan RTLH Tahun 2019

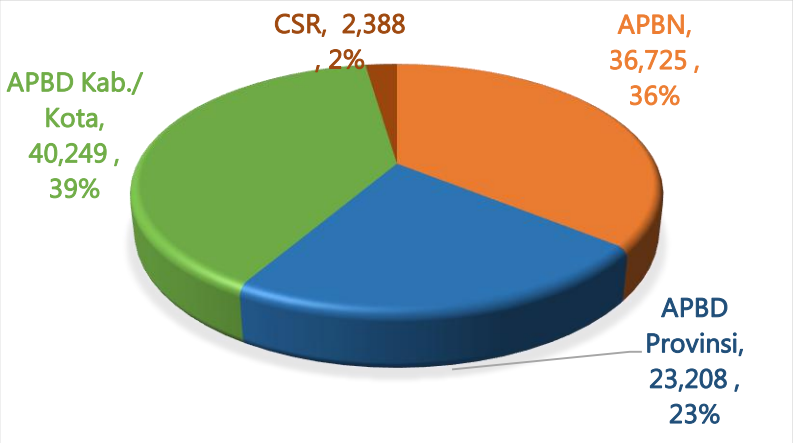

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 02.02.2020*

Dari grafik tersebut terlihat bahwa prosentase terbesar untuk kegiatan pengurangan RTLH di Provinsi Jawa Tengah, terbesar dari anggaran APBD Kabupaten/ Kota dengan prosentase sebesar 39%, kemudian dari anggaran APBN.

SASARAN 2: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
indikator kinerja sasaran dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran: % Penurunan kawasan kumuh
Yang mendukung capaian tersebut adalah:

- Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBN
- Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD Provinsi
- Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD kabupaten/ kota

Angka total yang didapatkan untuk memenuhi capaian tersebut sebagai berikut:

TABEL 4.13
Angka Capaian % Penurunan Kawasan Kumuh

SUMBER	LUASAN YANG DITANGANI (Ha)
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBN (KOTAKU)	756,04
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD Provinsi	20,52
Luas kawasan kumuh yang ditangani, bersumber dari APBD kabupaten/ kota	0
JUMLAH TOTAL LUASAN KAW. KUMUH YANG DITANGANI	**776,56**

***Sumber**: dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

Breakdown masing-masing kabupaten/ kota pada TABEL 4.9

Rumus perhitungan capaian hingga tahun 2019, sebagaimana tabel dibawah ini

TABEL 4.14

Perhitungan Indikator Kinerja % Penurunan Kawasan Kumuh

SK Kumuh BUPATI / WALIKOTA (BASELINE 2018)	BASELINE 2017	BASELINE 2018		tahun ke-1 (2019)	LUAS YANG DITANGANI (Ha)
Luas (ha) kumuh Total jateng	**6.987,47**	**3.004,59**	**PUSAT**	1.145	756,04
		82,86	**PROV**	454,14	20,52
			KAB/KOTA	589	
			JUMLAH	**2.188**	**776,56**
			AGREGAT	**60,35%**	
			PROVINSI	95,68%	4,32%

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

KETERANGAN:

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA (Baseline 2018)

- Luas (Ha) kaw. Kumuh Jateng, Baseline 2017: 6.987,47 Ha
- Capaian terakhir : 17,14% ➔ TELAH DITANGANI s/d 2018 ***(Sumber LPKJ)***
- Baseline 2018 : 3.004,9 Ha. Rencana Penanganan
  - Pusat : 1.900,92 Ha ➔ 63,27%
  - Provinsi : 474,66 Ha ➔ 15,80%
  - Kabupaten/ Kota : 629,01 Ha ➔ 20,93%

  TOTAL : 3.004,59 Ha ➔ 100%

GRAFIK 4.2

Prosentase Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2019

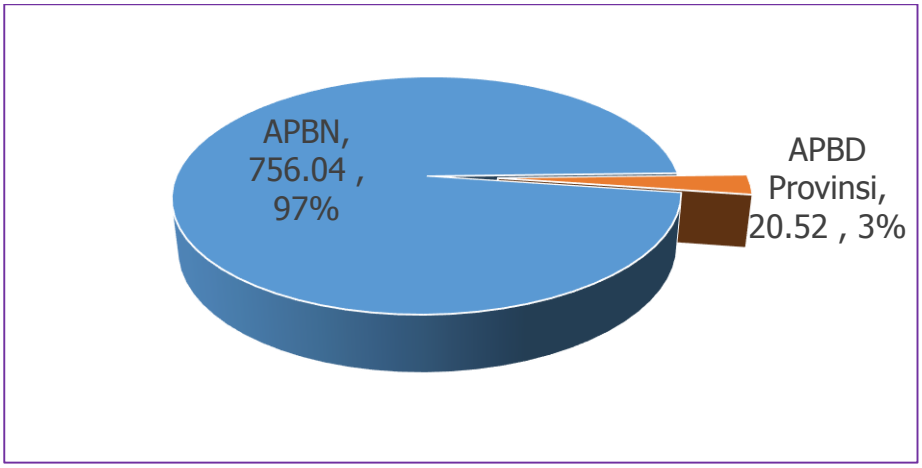

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

Dari grafik tersebut terlihat bahwa prosentase luasan penanganan kawasan kumuh terbesar berasal dari anggaran APBN dengan prosentase sebesar 97%. Hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten/ Kota tidak digunakan untuk menangani kawasan kumuh yang masuk dalam SK Bupati/ Walikota tentang Kawasan Kumuh.
Kegiatan APBD Kabupaten/ Kota untuk kawasan permukiman, diarahkan untuk pencegahan munculnya kawasan kumuh baru.

SASARAN 3: Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum

indikator kinerja sasaran dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran: ***% Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum***
Yang mendukung capaian tersebut adalah program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan indikator kinerja adalah % penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Capaian sebesar 108,91%

SASARAN 4: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

indikator kinerja sasaran dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran: ***Nilai kepuasan masyarakat***,
Capaian sebesar ***79,75%***

SASARAN 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

indikator kinerja sasaran dan dukungan capaiannya sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran: ***Nilai SAKIP perangkat daerah***
Capaian sebesar ***73,10%***

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Program dan indikator kinerja program pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.15
Program dan Indikator Kinerja Program pada RENSTRA Dinas
(Target dan Capaian Tahun 2019)

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019		2020
		Target	Capaian	Target
1. Pembangunan Perumahan (BIDANG PERUMAHAN)	% RLH yang disediakan	0		4,57%
	% RTLH yang tertangani	4,94%	4,89%	10,35%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019		2020
		Target	Capaian	Target
2. Penanganan Kawasan Permukiman (BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)	% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2,11%	4,32%	4,21%
3. Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (BIDANG KETERPADUAN PKP)	% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100%	100%	100%
4. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (BIDANG PERTANAHAN)	% Penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	100%	108,91%	100%

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

Pada masing-masing indikator kinerja program, yang mendukung capaian dan besaran capaian adalah sebagai berikut:

TABEL 4.16

Angka Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ANGKA CAPAIAN		2019	
		SUMBER DATA PENDUKUNG	CAPAIAN	Target	Capaian
1. Pembangunan Perumahan ***(BIDANG PERUMAHAN)***	% RLH yang disediakan	--		0	0
	% RTLH yang tertangani	Jumlah penanganan RTLH dengan anggaran dari APBD Provinsi	23.208 unit	4,94%	4,89%
2. Penanganan Kawasan Permukiman ***(BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)***	% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani dengan anggaran dari APBD Provinsi	20,52 Ha	2,11%	4,32%
3. Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja			100%	100%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ANGKA CAPAIAN		2019	
		SUMBER DATA PENDUKUNG	CAPAIAN	Target	Capaian
(BIDANG KETERPADUAN PKP)	perumahan rakyat dan kawasan permukiman				
4. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah ***(BIDANG PERTANAHAN)***	% Penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum			100%	108,91%
5.					

***Sumber**: Hasil Olahan dari berbagai sumber, status 25.01.2020*

Bab V
Hasil Capaian

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Capaian indikator kinerja tujuan pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan pada RENSTRA Dinas
Tahun 2019

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Target Pada Tahun		Capaian	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	% rumah tangga yang memiliki akses terhadp hunian yang layak	83,65%	89,28%	84,35%	100,84%	94,48%
	% kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	79,26%	79,39%	79,33%	100,09%	99,92%
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pemb. untuk kepentingan umum	% kepastian hukum atas bidang tanah	100%	100%	108,91%	108,91%	--
3. Maningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	100%	79,75%	79,75%	--

***Sumber**: dari berbagai sumber yang diolah, status 02.02.2020*

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Capaian indikator kinerja sasaran pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 5.2

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RENSTRA Dinas
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Pada Tahun		Capaian 2019	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
1. Meningkatnya jumlah RLH bagi masy. dan masy. yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	% Peningkatan jumlah RLH	2,90%	34,16%	6,48%	223,45%	18,97%
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	% Penurunan kawasan kumuh	77,12%	49,83%	60,35%	127,79%	82,57%
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	% Penyediaan tanah bagi pemb. untuk kepentingan umum	100%	100%	108,91%	108,91%	--
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	100%	79,75%	79,75%	--
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71,65%	72,25%	73,10%	102,02%	101,18%

***Sumber**: dari berbagai sumber yang diolah, status 02.02.2020*

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Indikator kinerja program pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.25

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RENSTRA Dinas
Tahun 2019

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Pada Tahun		Capaian 2019	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
1. Pembangunan Perumahan	% RLH yang disediakan	0				

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Pada Tahun		Capaian 2019	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
(BIDANG PERUMAHAN)	% RTLH yang tertangani	4,94%	37,24%	4,89%	98,99%	13,13%
2. Penanganan Kawasan Permukiman (BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)	% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2,11%	32,95%	4,32%	204,74%	13,11%
3. Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (BIDANG KETERPADUAN PKP)	% Ketersediaan kebijakan, data, dan ev. kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100%	100%	100%	100%	20%
4. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (BIDANG PERTANAHAN)	% Penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	100%	100%	108,91%	108,91%	--

***Sumber**: dari berbagai sumber yang diolah, status 02.02.2020*

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perakim adalah sinergi dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun peran pengurangan kemiskinan dari Dinas Perakim sangat kecil, namun pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan memiliki penanganan yang saling terkait.

Target paling utama di bidang perumahan adalah terkait dengan kegiatan pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH). Kegiatan penanganan RTLH di Provinsi terkendala oleh besarnya dana stimulant. Kendala lainnya adalah pada proses mekanisme administrasi dan tidak disediakan pendamping/ fasilitator dalam pencairan maupun pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

Pada Bidang Kawasan, adalah penanganan kawasan kumuh serta pencegahan munculnya kawasan kumuh baru. Selama ini penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati/ Walikota ditangani dari dana APBN. Dana APBD kabupaten/ kota lebih dialokasikan pada pencegahan munculnya kumuh baru. Pembinaan ke masyarakat di kawasan kumuh juga perlu ditingkatkan agar lebih terwujud kawasan permukiman yang bersih, sehat, nyaman dan aman serta ramah terhadap lingkungan.

Permasalahan di Bidang pertanahan yaitu pada minimnya pemahaman dan pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan permasalahan terkait pertanahan maupun sengketa pertanahan yang menjadi ranah hukum wewenah daerah Provinsi, permasalahan pendataan dan identifikasi aset kepemilikan daerah Kabupaten/Kota hingga Daerah Provinsi.

TABEL PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Program / Indikator	Permasalahan	Solusi
Pembangunan Perumahan - % rumah layak huni yang disediakan - % Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	- Penanganan RTLH belum optimal; - Masih sedikit database DTPPFMOTM 2018 yang lolos verifikasi; - Terdapat data calon penerima yang tidak masuk ke dalam PBDT/DTPPFMOTM - Kemampuan penerima untuk berswadaya rendah; - Besaran bantuan yang disetujui belum bisa menjadikan rumah layak huni (masih sebatas layak huni).	- Pembagian penanganan kegiatan RTLH melibatkan sektor swasta dan dilengkapi dengan sistem perbankan; - Pembaruan database sesuai dengan kondisi dilapangan dengan memverivikasi serta memvalidasi kembali hingga ke penerima bantuan RTLH; - Peningkatan Nominal bantuan RTLH serta kemudahan dalam proses permohonan secara administrasinya.
Penanganan Kawasan Permukiman - % luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	- Penanganan kawasan kumuh masih bersifat kurang fokus dengan bentuk masih menyebar atau *sprawl;* - Minimnya pengawasan dan pengendalian pertumbuhan kawasan kumuh; - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlingkungan yang bersih dan sehat; - Minimnya kesadaran gotongroyong dalam menangani kawasan kumuh.	- Melakukan penanganan Kawasan Kumuh fokus dengan sistem pendampingan Desa hingga selesai dalam penuntasan dari kumuh; - Penanganan/ pengendalian munculnya kawasan kumuh baru dengan kegiatan yang bersifat menjaga lingkungan dan membersihkan lingkungan; - Menumbuhkan kesadaran di masyarakat dalam penanganan kumuh.
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah - % penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	- Minimnya pemahaman dan pengetahuan OPD di kab/kota dalam penganan permasalahan pertanahan; - Belum tersedianya petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional; - Minimnya pembuatan sertifikat hak atas tanah di lahan pertanian (LP2B); - Masih minimnya pendaftaran aset tanah desa/ulayat/adat yang tersertifikat; - Proses pelaksanaan yang belum optimal Identifikasi dan inventarisasi data pertanahan Prov. Jateng; - Minimnya pemahaman aparatur Pemerintah tentang kebijakan urusan Bidang Pertanahan; - Minimnya kontrol, pengawasan dan pengendalian perubahan/alih fungsi lahan pertanian; - Penentuan nilai tanah berdasarkan pada asumsi nilai jual tanah/	- Bintek dan pelatihan serta pemahaman bagi OPD Kabupaten/Kota dalam penanganan permasalahan pertanahan; - Proses sosialisasi program dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat berkaitan dengan program dan kegiatan pertanahan; - Implementasi penghargaan dan sanksi tegas dalam penyalahgunaan dan perubahan fungsi lahan/tanah; - Proses identifikasi, verifikasi dan validasi dalam aset milik Pemerintah Prov, Kab/Kota hingga ke Desa serta melakukan sertifikasi; - Mendorong terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria ; - Menyusun Perbup/Perwal terkait pendaftaran (PTSL); - Pelaksanaan BINTEK pengadaan tanah; - Pengembangan fitur aplikasi SIKUNANG; - Koordinasi dan konsolidasi basis data terpadu terkait zona nilai tanah.

Sumber: Dinas Perakim Prov. Jateng 2019

STRATEGI CAPAIAN TARGET RENSTRA

Prg	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Sat.	Target 2020	Target Akhir Renstra PD	STRATEGI PENCAPAIAN
Pembangunan Perumahan		% RLH yang disediakan	%	4,57	12,50	- Pendampingan dan Penagawalan kegiatan RTLH dengan berkoordinasi dengan pihak kabupaten hingga Desa; - Pelaksanaan Bimbingan Teknis RTLH dilaksanakan langsung ke masing-masing Desa dalam proses memahamkan terkait bantuan prioritas dan proses pengajuan bantuan; - Pendampingan dalam pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran untuk menjadi rumah layak huni; - Persiapan tahapan Pembangunan Baru dengan mengakomodir TFL - Pelatihan TFL terkait teknis dan administrasi
		% RTLH yang tertangani	%	10,35	37,24	
	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dok.	2	10	
		Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	500	3.500	
	Peningkatan dan Pemb. Perum. Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	25.677	153.327	

Prg	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Sat.	Target 2020	Target Akhir Renstra PD	STRATEGI PENCAPAIAN
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	217	974	- Koordinasi dengan pihak Kabupaten hingga Desa calon penerima bantuan
Penanganan Kawasan Permukiman		% luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4,21	32,95	- Pendampingan dan pengawalan kegiatan penanganan kawasan kumuh; - Pendataan kawasan kumuh, verifikasi dan validasi data kaw. Kumuh, menyusun kesepakatan penanganan kawasan kumuh; - Mengusulkan revisi pergub bantuan keuangan terkait dengan pembangunan sapras
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani	Lok.	2	22	
	Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Lok.	6	24	
	Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	Dok.	3	8	
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		% penyediaan tanah bagi masy. dan pemb. untuk kepent. umum	%	100	100	- Berkoordinasi secara lebih intensif dengan, Kantor BPN Prov. Jateng, TIM GTRA Prov. Jateng, kab/kota yang membidangi pertanahan; - Mendorong K/K dalam membentuk **Gugus Tugas Reforma Agraria**; - Mendorong kab/kota untuk menyusun Perbup/Perwal terkait pendaftaran (PTSL); - Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi atas HP dan HGU; - Pelaksanaan BINTEK pengadaan tanah; - Pengembangan fitur aplikasi SIKUNANG; - Koordinasi dan konsolidasi basis data terpadu terkait zona nilai tanah;
	Penanganan Permasalahan Pertanahan	% Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	20	100	
	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	% Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	20	100	
	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	% Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	20	100	

Sumber: Bidang Keterpaduan 2019

Bab VI
Penutup

PENUTUP

Evaluasi adalah proses untuk mengetahui pelaksanaan program/ kegiatan, apakah sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan perbaikan maupun memberikan perubahan kebijakan, aturan dan perencanaan dalam pembangunan khususnya terkait dengan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang menjadi salah satu alokasi kesejahteraan, pemerataan dan kebermanfaatan program serta kegiatan pemerintah.

Hasil evaluasi dapat merupakan capaian kinerja, permasalahan/ hambatan serta strategi pemecahan masalah. Hasil ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan perencanaan kedepan. Berikut adalah capaian RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023.

TABEL 6.1

Capaian Indikator Kinerja Tujuan pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023
Tahun Anggaran 2019

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Target Pada Tahun		Capaian	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	% rumah tangga yang memiliki akses terhadp hunian yang layak	83,65%	89,28%	84,35%	100,84%	94,48%
	% kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	79,26%	79,39%	79,33%	100,09%	99,92%
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pemb. untuk kepentingan umum	% kepastian hukum atas bidang tanah	100%	100%	108,91%	108,91%	--
3. Maningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	100%	79,75%	79,75%	--

***Sumber**: dari berbagai sumber yang diolah, status 02.02.2020*

TABEL 6.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023
Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Pada Tahun		Capaian 2019	% Capaian Terhadap	
		2019	2023		Tahun 2019	Tahun Akhir RENSTRA
1. Meningkatnya jumlah RLH bagi masy. dan masy. yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	% Peningkatan jumlah RLH	2,90%	34,16%	6,48%	223,45%	18,97%
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	% Penurunan kawasan kumuh	77,12%	49,83%	60,35%	127,79%	82,57%
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	% Penyediaan tanah bagi pemb. untuk kepentingan umum	100%	100%	108,91%	108,91%	--
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100%	100%	79,75%	79,75%	--
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71,65%	72,25%	73,10%	102,02%	101,18%

***Sumber**: dari berbagai sumber yang diolah, status 02.02.2020*

REKOMENDASI

Data merupakan faktor utama dalam perhitungan capaian kinerja. Kebutuhan akan data menuntut perlunya ***inventarisasi dan update data secara berkesinambungan***. Selain itu dibutuhkan ***penguatan koordinasi*** baik ditingkat pusat maupun ditingkat kabupaten/ kota. Diharapkan ada basis data di tingkatan terendah pada Rukun Tetangga.

Masih minimnya inovasi dalam pengembangan konsep, desain maupun metode dalam penyediaan rumah layak huni dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, regulasi dan mekanisme penyediaan rumah layak huni yang sehat serta tepat sasaran masih menjadi permasalahan. Sehingga diperlukan trobosan untuk ***penerapan implementasi hasil rekayasa teknologi*** bidang perumahan.

Terdapat proses bantuan berbentuk stimulan dimasyarakat yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan kegotong-royongan dan sikap peduli terhadap lingkungan. Sehingga ***diperlukan suatu penyadaran ke masyarakat*** untuk peduli dan memiliki tanggung jawab bersama.

Penanganan kawasan kumuh seharusnya ditangani secara komprehensif dan konsisten dengan melakukan monitoring, pengawasan dan ***pengendalian terhadap munculnya kawasan kumuh baru***.

Dikaitkan dengan peraturan yang ada dan capaian, seperti :

1. Peraturan terkait dengan Standart Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, dasar:
   a. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 11 (3), bahwa Pemerintah akan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar, salah satunya yaitu Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   b. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018, tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM). Standart Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
   c. Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menyebutkan bahwa muatan yang terkandung dalam SPM pada dasarnya mencakup atas jenis pelayanan dasar, kualitas mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar.
   d. Permendagri No.100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Penerapan SPM meliputi: a).Pengumpulan Data; b).Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar; c).Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d).Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

   Dari keempat peraturan tersebut, disebutkan bahwa ada ***urusan Pemerintahan yang Wajib dilaksanakan*** berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang salah satunya adalah SPM Perumahan Rakyat. SPM Perumahan Rakyat terdiri dari:
   1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi
   2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang akan ditetapkan.
3. Update data dan capaian pada RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023

Dikaitkan dengan peraturan yang ada seperti tersebut diatas, dan capaian RENSTRA Dinas maka perlu untuk ***meninjau ulang dokumen perencanaan*** strategis dinas (RENSTRA Dinas PERAKIM Tahun 2018-2023).